

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2015, *KPK dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, Jakarta.
- Alimandan, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Radjawali, Jakarta.
- Alius, Suhardi, 2019, *Menjalin Sinergi: 14 Bulan sebagai Kabareskrim Polri*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 1843, *The Works of Jeremy Bentham Volume IX*, William Tait, Edinburgh.
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Butar-Butar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Britannica, Encyclopaedia, 2000, *Encyclopaedia Britannica CD 2000, Deluxe Edition, International Version*, Oxford University Press, Oxford.
- Churchill, Winston S., 1956, *The Birth of Britain – A History of The English-Speaking Peoples Volume 1*, Cassel and Company, London.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dicey, Albert Venn, 1915, *Introduction to The Study of The Law of Constitution*, Macmillan, London.

Doyle, Charles, 2006, *Federal Habeas Corpus: A Brief Legal Overview*, Congressional Research Service, Washington D.C.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

El-Muhtaj, Majda, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Farrel, Brian R., 2017, *Habeas Corpus in International Law*, Cambridge University Press, New York.

Gultom, Binsar, 2015, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hamzah, Fahri, 2011, *Kemana Ujung Century? Penelusuran dan Catatan Mantan Anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR-RI*, Yayasan Faham Indonesia, Jakarta.

Harasymiw, M. Alexander, 2011, *The British Colonies: The Story of America*, Gareth Stevens Publishing, New York.

Hatta, Moh., 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galangpress, Yogyakarta.

Hayes, Carlton Josep Huntley, 1962, *History of Western Civilization*, Macmillan, London.

Heidenheimer, Arnold J. dan Michael Johnston, 2002, *Political Corruption: Concepts and Contexts*, Transaction Publishers, New Jersey.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2015, *Buku Materi Pokok HKUM4406/4SKS/MODUL: Hukum Acara Pidana*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hodgson, Jacqueline, 2005, *French Criminal Justice: A Comparative Account of the Investigation and Prosecution of Crime in France*, Bloomsbury Publishing, Oxford.

_____, 2010, *Conceptions of the Trial in Inquisitorial and Adversarial Procedure*, Hart Publishing, Oxford.

ICJR, 2014, *Hukum Acara Praperadilan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

_____, 2014, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Johan, Teuku Saiful Bahri, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Kariangan, Hendra, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok.

Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Lion, Jacobus, 1886, *Nederlandsch- Indische Strafvordering voor Europeanen en met hen gelijkgestellten*, E.J. Brill, Leiden.
- Loqman, Loebby, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Martokoesoemo, Prianto H., 2008, *Law of Spiritual Attraction*, Mizan Media Utama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta.
- Mcbrien, Richard, 1994, *Catholicism*, Geoffrey Chapman, London.
- McCabe, Peter G., 2016, *A Guide to the Federal Magistrate Judges System: A White Paper Prepared at the Request of the Federal Bar Association*, Federal Bar Associaton, Virginia.
- McDonald, Pete, 2011, *Foot-tracks in New Zealand: Origins, Access Issues, and Recent Developments*, Pete Mcdonald, New Zealand.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi, 2011, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Montefiore, Simon Sebag, 2006, *Speeches that Change the World: The Stories and Transcripts of the Moments that Made History*, Quercus Publishing, London.
- Munandar, Haris, 2008, *Pidato-Pidato yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-Pidato Bersejarah*, Erlangga, Jakarta.

Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, S., 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Ode, M. D. La, 1997, *Politik Tiga Wajah*, Yayasan Obor, Jakarta.

Parera, Ana M.F., *et al.*, 2013, *Sausapor Saksi Sejarah Perang Dunia II*, Kepel Press, Yogyakarta.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran, dan Prosedur dalam Penemuan Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Priyanto, A.T. Sugeng, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rafael, Vicente L., 1999, *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam*, Cornell Southeast Asia Program Publications, New York.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

_____, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sampford, Charles, *et al.*, 2006, *Law, Ethics and Governance Series: Measuring Corruption*, Routledge, New York.

Setiadi, Wicipto, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Soesatyo, Bambang, 2010, *Untold Stories: Skandal Gila Bank Century, Mengungkap yang Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-Reformasi*, Ufuk Press, Jakarta.

Sugianto, 2018, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.

Stroink, Frits dan Eveline van der Linden, 2005, *Judicial Lawmaking and Administrative Law*, Intersentia Antwerpen, Oxford.

Tak, P.J.P., 2008, *The Dutch Criminal Justice System*, Wolf Legal Publishers, Nijmegen.

van Bemmelen, Jacob Maarten, 1982, *Straafprocesrecht*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen an de Rijn.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal/Koran

Hamid Awaluddin, “Penjara itu Tempat Pencabutan Kemerdekaan”, *Koran Tempo*, 6 November 2004.

Jawahir Thontowi, “Pendekatan Hukum Inklusif dalam Penanganan Kasus Korupsi”, *Harian Seputar Indonesia*, 23 Januari 2019.

Sri Nur Hari Susanto, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 2, 2014.

Yitno Ramli, “RUU KUHAP Dikritisi di Unair”, *Warta Unair*, 1 April 2013.

C. Hasil Penelitian

Annisa Noviyati, 2017, “Kompetensi Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum dalam Melakukan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hamida Alfathi, 2017, “Politik Hukum terkait Praperadilan dalam hal Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Gaza Carumna, 2016, “Analisis Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) terkait Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Rizka Fakhry, 2015, “Implikasi Lemahnya Pengaturan Perihal Praperadilan dalam KUHAP terhadap Pelaksanaan Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Taufan Trianggara Atmaja, 2015, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Makalah/Pidato

Artidjo Alkostar, “Prospek HAM Abad XXI”, *Makalah Seminar Demokrasi dan HAM*, LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999.

The Lord Neuberger of Abbotsbury, “Magna Carta: The Bible of the English Constitution or a Disgrace to the English Nation?”, *Pidato*, Pidato pada saat Menjabat President of the UK Supreme Court, Guildford Cathedral, 18 Juni 2015.

Eddy O.S. Hiariej, “Hakim Keliru dalam Mengambil Putusan Hukum Irman Gusman”, *Pidato*, Bedah Buku Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 22 Januari 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545K/Pid.Sus/2013 tertanggal 23 April 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 765K/PID.SUS/2017 tertanggal 18 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tertanggal 19 April 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tertanggal 8 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tertanggal 26 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 16 Maret 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XI/2013 tertanggal 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/PRA/2014/PN.Byl. tertanggal 5 Desember 2014.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tertanggal 27 September 2012.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat
Nomor 76/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 27 Desember
2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat
Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PSt tertanggal 24 April 2018.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor 56/Pid/TPK/2012/PT.DKI. tertanggal 13 Desember 2012.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 104/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. tertanggal 9 Oktober 2018.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 14 Desember 2017.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. tertanggal 27 November 2012.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Februari 2015.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 62/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 31 Mei 2016.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 100/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Agustus 2016.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 122/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 18 Oktober 2016.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 29 September 2017.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 133/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 14 Desember 2017.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 9 April 2018.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 138/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 4 Desember 2018.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 139/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 4 Desember 2018.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 140/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 4 Desember 2018.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Februari 2019.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
19/Pid.Pra/2016/PN.Sby. tertanggal 12 April 2016.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
25/Pid.Pra/2016/PN.Sby. tertanggal 22 April 2016.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
28/Pid.Pra/2016/PN.Sby. tertanggal 23 Mei 2016.

G. Website

BBC News Indonesia, “Kilas Balik Kasus Bank Century”,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101, diakses tanggal 12 November 2019.

_____, “Kronologi Kasus Budi Gunawan dan
Ketegangan KPK-Polri”,
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk, diakses tanggal 20 Maret 2019.

CNN Indonesia, “Kronologi Kasus Bank Century Seret Nama Boediono”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180411121840-81-289991/kronologi-kasus-bank-century-seret-nama-boediono>, diakses tanggal 12 Januari 2019.

Dimas Hutomo, “Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58e921c313b7b/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi>, diakses tanggal 23 Juli 2019.

Fred Glueckstein, “Proposal by Churchill to Gift *Magna Carta*”,
<https://winstonchurchill.org/publications/finest-hour-extras/churchill-to-gift-magna-carta/>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

ICJR, “Mendudukkan *Ne bis in Idem* dalam Praperadilan Indonesia”,
<http://icjr.or.id/mendudukkan-nebis-in-idem-dalam-praperadilan-indonesia/>, diakses tanggal 23 April 2019.

Jehovah Witness, “*Magna Carta*, Pencarian Manusia akan Kemerdekaan”,
<https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp/in/102002924#h=14>, diakses tanggal 22 Januari 2019.

Tempo.co, “Terima Aduan MAKI Soal Setya Novanto, MKD: Kami Verifikasi Dulu”,
<https://nasional.tempo.co/read/856729/terima-aduan-maki-soal-setya-novanto-mkd-kami-verifikasi-dulu/full&view=ok>, diakses tanggal 14 April 2019.

Teropong Senayan, “MAKI Gugat Pansus Angket KPK ke Pengadilan”,
<http://www.teropongsenayan.com/65337-maki-gugat-pansus-angket-kpk-ke-pengadilan/tstv>, diakses tanggal 14 April 2019.

H. Lain-lain

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonnesie (Stb. 1847 No.23)

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Merriam-Webster Law Dictionary.

Reglement op de Strafvoerdering (Stb. 1849 No. 63)

The Constitution of the United States.

United Nations Convention Against Corruption.

United Nations General Assembly Document A/RES/34/178.